



MIMIKA MEMBANGUN

Eme Neme Yauware



Salam Redaksi

Pembaca yang terhormat, Media Bappeda ini kami hadirkan sebagai implementasi dari tanggungjawab kami untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang lengkap dan benar atas berbagai aktivitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Mimika.

Percepatan pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah, baik infrastruktur maupun pelayanan publik dan pengembangan sumber daya manusia, serta mental spiritual, secara bersamaan dan sinergis, dengan melibatkan semua unsur dalam pemerintahan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Mimika.

Media ini adalah dokumentasi atas sebagian dari perjalanan pembangunan di Kabupaten Mimika. Kami persembahkan untuk seluruh lapisan masyarakat sebagai salah satu sumber informasi atas kiprah pemerintah yang benar, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk peningkatan kualitas Media ini dan bagi kemajuan pembangunan di Mimika.

Tim Redaksi

Pengarah

Bupati Mimika

Penanggungjawab

Kepala Bappeda

Tim Redaksi

Koordinator

Sekretaris Bappeda Mimika

Anggota :

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan Ekonomi

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kepala Bidang Pengendalian

Kantor Bappeda Kabupaten Mimika
Jl. Cendrawasih SP.II, Utikini Baru,
Kec. Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua. 99963



Mimika Membangun Edisi Maret

Daftar Isi

- **Laporan Utama** Hal. 3-7
- **Laporan Khusus** Hal. 8-19
- **Bidang Infrastruktur** Hal. 20-30
- **Bidang Ekonomi** Hal. 31-39
- **Musrenbang** Hal. 40-47



Plt Bupati Serahkan DPA Tahun 2023

PELAKSANA Tugas Bupati Mimika, Johannes Rettob menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna anggaran, Senin (19/3/2023) di Hotel Grand Tembaga.

“
Penyerahan DPA bukan berarti langsung diperjualbelikan, ini tidak boleh sama sekali, tetapi dilaksanakan sesuai dengan prosedur,”



Foto: Bappeda

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna anggaran, Senin (19/3/2023) di Hotel Grand Tembaga.



Plt Bupati dengan tegas mengingatkan para pimpinan OPD untuk tidak memperjualbelikan pekerjaan. “Penyerahan DPA bukan berarti langsung diperjualbelikan, ini tidak boleh sama sekali, tetapi dilaksanakan sesuai dengan prosedur,” ungkapnya.



Foto: Bappeda



Penyerahan DPA ini diakuinya sudah sangat terlambat. Walaupun terlambat, Rettob berharap DPA ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam rangka reformasi birokrasi, semua pimpinan OPD harus menandatangani komitmen kerja dengan bupati. Selanjutnya juga harus menandatangani pakta integritas.



Foto: Bappeda



Semua pekerjaan kata Rettob harus dilakukan dengan tanggung jawab. Harus sesuai dengan prosedur mulai masuk dalam aplikasi SIRUP, LPSE dan proses pelelangan dilakukan. Semua ini selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dipersyaratkan.

la berpesan juga agar dalam pelaksanaan DPA ini, OPD bisa melibatkan masyarakat baik dalam sektor pekerjaan padat





karya, pekerjaan tidak hanya dikuasai oleh satu kontraktor saja. "Tahun ini kita harus betul-betul melaksanakan pembangunan dengan baik," ujarnya.

Semua pekerjaan yang berkontrak lanjutnya harus sudah selesai sebelum tanggal 20 Desember. Ini ditekankan Plt Bupati agar tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember. **(BAPPEDA)**

N DPA
RINTAH DAERAH
MIMIKA
RAN 20



Foto: Bappeda



Plt Bupati Pimpin Apel Gabungan

PELAKSANA Tugas (Plt) Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Senin (20/3/2023) di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika.



Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, SSos MM ketika memimpin apel gabungan ASN.

Foto: Bappeda



Pada kesempatan itu Plt Bupati meminta jajaran pemerintahan untuk tetap bekerja melaksanakan apa yang sudah direncanakan dan diprogramkan di Tahun 2023. Dimana, program diarahkan untuk pembangunan dari kampung dan peningkatan pemberdayaan ekonomi baik di pedalaman dan perkotaan. Sehingga seluruh masyarakat Mimika bisa menikmati pembangunan dari APBD yang nilainya mencapai Rp 5 triliun.

Plt Bupati mengapresiasi pimpinan OPD dan staf yang telah berkontribusi dalam memberikan pelayanan se-

hingga bisa mendapat penghargaan. Seperti Dinas Kesehatan Mimika yang mewujudkan Universal Health Coverage Jaminan Kesehatan Nasional. "Saya target 100 persen masyarakat Mimika bisa terlayani kesehatan," katanya.

Begitu pula dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terus berinovasi memberikan pelayanan sehingga bisa meraih penghargaan. Plt Bupati juga mendorong peningkatan layanan pendidikan dengan pemberian bantuan beasiswa, peningkatan pelayanan pendidikan di pedalaman.

Hal lain yang juga disampaikan JR adalah terkait penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi ASN yang wajib lapor LHKPN. Ia memberi waktu hingga 31 Maret 2023 kepada ASN untuk menyampaikan LHKPN dengan pendampingan dari Inspektorat.

Begitu pula dengan audit yang sedang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Audit ini merupakan pemeriksaan terinci sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan pendahuluan. (BAPPEDA)



Apelgabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Senin (20/3/2023) di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika.

Foto: Bappeda



Pemkab Mimika Gelar Forum Perangkat Daerah

CENDRAWAS

Kepala Bappeda Mimika
Ir. Yohana Paliling

DISTRIK dan kampung telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sebelum dibahas dalam Musrenbang kabupaten, usulan dari distrik terlebih dahulu dibahas dalam Forum Perangkat Daerah yang digelar selama dua hari, Kamis-Jumat (30-31/3/2023) di Hotel Serayu Timika.



Foto: Bappeda



Foto: Bappeda

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Paulus Dumais didampingi Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi dan Ketua Komisi B DPRD Mimika, Nurman Karupukaro pada kegiatan Forum Perangkat Daerah.

Lewat forum tersebut, distrik dan OPD teknis langsung bertemu membahas dan langsung menginput dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Kegiatan yang merupakan

tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 itu dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Paulus Dumais didam-

pingi Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi dan Ketua Komisi B DPRD Mimika, Nurman Karupukaro. Turut hadir Forkopimda dan pimpinan OPD.



Foto: Bappeda



Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Paulus Dumais mengatakan Forum Perangkat Daerah merupakan bagian dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang dituang-

kan dalam rencana kerja atau renja perangkat daerah dan bermuara pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah atau RKPD dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau RAPBD.

Untuk itu OPD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2023 harus

mempertimbangkan dan sejalan dengan arah pembangunan serta fokus sasaran pembangunan tahun anggaran 2023 yang diarahkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan guna mendorong dan mewujudkan implementasi inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.



Sementara itu, Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi menekankan kepada seluruh OPD agar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) memprioritaskan pada program yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). "Tahun ini mulai pandu supaya Renja akan diberi tanda mana

yang SPM, mana yang bukan. Karena anggaran kita besar tapi kenapa SPM tidak tercapai, kenapa tingkat kemiskinan masih tinggi," katanya.

Seperti Tahun 2023, Pemkab Mimika mulai mengarahkan pembangunan ke wilayah pinggiran, pesisir dan pedalaman maka di Tahun 2024 mendatang juga

demikian meskipun daerah dimana jumlah penduduk terpusat juga tetap menjadi fokus.

Yohana Paliling menyebut total pagu dana yang dialokasikan untuk distrik pinggiran, pesisir dan pedalaman di Tahun 2023 ini mencapai Rp 556 miliar. Terdiri dari 235 kegiatan. Itu mengalami



Asisten/Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Paulus Dumais didampingi Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi dan Ketua Komisi B DPRD Mimika, Nurman Karupukaro pada kegiatan Forum Perangkat Daerah.

Foto: Bappeda

peningkatan sebesar 47 persen dari tahun sebelumnya. “Jadi saat kami dampingi distrik melakukan Musrenbang, kami sampaikan bahwa memang belum dibangun tapi sudah dimasukkan dalam program tahun ini, yang belum kita usulkan tahun depan,” terangnya.

Adapun jumlah usulan yang masuk ke Forum OPD sebesar 1.975 usulan. Hanya 790 usulan yang disetujui dan 1.185 ditolak.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Ir Yohana Paliling mengatakan ada sejumlah usulan yang ditolak karena diarahkan untuk dibiay-

ai menggunakan dana desa dan tidak harus melalui program kerja OPD.

Ia bahkan mengungkapkan, sampai saat ini Rencana Kerja (Renja) yang diusulkan OPD sudah hampir mencapai Rp 7 triliun atau di posisi Rp 6,9 triliun lebih. Usulan dari Forum OPD dan Renja ini selanjutnya akan dikordinasikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) yang dijadwalkan pada awal April 2023 mendatang.

Yohana menegaskan, usulan tersebut juga disesuaikan dengan pagu anggaran Tahun 2024 dan diprioritaskan pada program yang mengacu

pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), urusan wajib, SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan, mandatory dan program prioritas lainnya.

Usulan dari OPD ini dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani bersama dalam penutupan Forum Perangkat Daerah yang digelar Jumat (31/3/2023) di Hotel dan Resto Cenderawasih 66. Berita acara ditandatangani Kepala Bappeda, Ir Yohana Paliling, MSi, perwakilan OPD, perwakilan distrik dan Plh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Petrus Lewa Koten.





Plh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Petrus Lewa Koten mengatakan persoalan pokok yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan adalah terletak pada proses menentukan pilihan program kegiatan yang prioritas untuk didahulukan pelaksanaannya sesuai kebutuhan masyarakat.

Namun apa yang telah dibahas dan disepakati oleh distrik dan OPD selanjutnya akan dibawa ke Musrenbang kabupaten sebagai bahan penyusunan RKPD yang bertujuan untuk menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda



199 PNS Pemkab Mimika Sampaikan LHKPN

SEBAGAI penyelenggara negara, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk beberapa poisis dan jabatan diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). LHKPN wajib dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahun.

Di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika ada 199 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masuk dalam wajib LHKPN. Dimulai dari Bupati dan Wakil Bupati, Sekda, pejabat eselon II, eselon III dan bendahara di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sesuai ketentuan penyampaian

LHKPN dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat pada 31 maret tahun berikutnya atau sesuai dengan kebijakan organisasi.





Memasuki pertengahan Maret 2023, Plh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Petrus Lewa Koten saat memimpin apel gabungan ASN di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (13/3/2023) menyebutkan bahwa ada 199 ASN yang wajib melaporkan LHKPN.

Petrus meminta seluruh PNS yang masuk wajib LHKPN untuk segera mengisi form yang sudah diberikan. Pimpinan OPD yang sudah lapor diharap bisa memperhatikan bawahannya dalam hal ini eselon 3 dan bendahara yang belum lapor.

Sebenarnya, diungkapkan Petrus, ada sanksi tegas yang diberikan kepada PNS yang tidak melaporkan



LHKPN berupa penundaan pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan karena menyangkut laporan

keuangan dan kinerja Pemkab Mimika secara keseluruhan. (BAPPEDA)



Para ASN lingkup Pemkab Mimika mengikuti apel gabungan di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika.

Foto: Bappeda

233 Pegawai Pemkab Mimika Terima SK Kenaikan Pangkat

PEMERINTAH Kabupaten Mimika memberikan apresiasi atas kinerja, prestasi dan pengabdian para Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai bentuk penghargaan, Pemkab Mimika memberikan SK kenaikan pangkat kepada 233 ASN periode 1 April 2023, Kamis (16/3/2023) di Gedung Eme Neme Yauware.

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mimika, Drs Ananias Faot mengatakan penyerahan SK kenaikan pangkat yang

jatuh temponya pada 1 April sudah dilakukan pada Maret.

Diserahkannya SK kenaikan pangkat lebih awal ini kata dia adalah salah satu langkah maju yang sudah dibuat karena kerja sama BKPSDM, BKN Regional IX dan BKN RI. Jumlah pegawai yang menerima SK kenaikan pangkat yakni 233 orang terdiri dari golongan I sebanyak 5 orang, golongan II 38 orang, golongan III 152 orang dan golongan IV baik IVa, IVb sebanyak 36 orang dan golongan IVc 2 orang.

Secara umum semuanya sudah ada persetujuan, namun masih ada sekitar 30-an orang yang belum ada SKnya karena harus menunggu tanda tangan Gubernur Provinsi Papua. Ini dikarenakan pada saat itu peralihan sementara pejabatnya belum ada, tetapi persetujuan tekniknya sudah ada dari BKN. Ini sudah bisa jadi dasar untuk penerimaan gaji.

Mewakili Plt Bupati, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Hendritte W Tandyono, SE MM mengungkapkan setelah



SK kenaikan pangkat diserahkan, maka gaji langsung mengikuti pangkat. Untuk PNS yang akan pensiun, juga diharapkan segera mengurus berkas. “Hal ini menjadi perhatian bagi kita semua baik bapak ibu yang sudah mau pensiun atau yang akan lanjut,” jelasnya.

Semua ASN kata dia diharapkan dapat memahami pangkat, kenaikan jabatan, eselon, pangkat pilihan. Jadi bagi mereka yang sudah menduduki jabatan namun golongan jabatan masih rendah, maka diharapkan mengundurkan diri karena tidak bisa naik pangkat. Sesuai aturan, kini tidak bisa lagi mengangkat atau menurunkan pegawai.

Sebanyak 233 orang ASN yang me-

nerima SK kenaikan pangkat, telah menunjukkan kinerja yang baik, meningkatkan disiplin, kinerja dan loyalitas. Bagi pegawai eselon III dan IV diharapkan menjadi contoh yang baik bagi pegawai dibawahnya. “Kita harus tunjukkan integritas kita, kepada masyarakat kita layani, untuk itu mari kita bekerja dengan baik,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor BKN Regional IX Jayapura, Sabar B Sormin, SKom MSi mengapresiasi penyerahan SK kenaikan pangkat jatuh tempo 1 April. Ini kata dia adalah yang pertama kalinya dilakukan di Timika.

Adapun pemberian SK kenaikan pangkat lanjutnya, sebagai bentuk penghar-

gaan atas prestasi dan pengabdian. Penghargaan berarti diberikan dari pemerintah dengan mengukur prestasi dengan SKP dulu DP3. Banyak kendala sebutnya, dalam penerapan sistim SKP ini.

Yang perlu diingat kata Sabar, kenaikan pangkat ini bukan hak pegawai. Tetapi, mendapatkan persyaratan kenaikan pangkat ada hasil kerja yang disebut kinerja. Kenyataan di Papua bagaimana mau kerja jika tidak pernah datang ke kantor.

“Bagaimana menuntut seseorang menghasilkan kinerja yang baik kalau yang bersangkutan tidak pernah ke kantor,”pungkasnya. **(BAPPEDA)**



Percepat Pembayaran OPD Tak Perlu Leges Kontrak Pihak Ketiga di Bappeda

DENGAN diterapkannya pengadaan barang dan jasa secara elektronik maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak perlu lagi melakukan leges kontrak perjanjian kerja dengan pihak ketiga di Bappeda.

Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi pada Kamis (9/3/2023) mengungkapkan dalam rapat koor-

dinasi yang dipimpin Pj Sekda dengan para pimpinan OPD telah disepakati bahwa mulai Tahun 2023, Bappeda tidak perlu lagi melakukan leges kontrak OPD dengan pihak ketiga.

Hal ini juga disepakati oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Inspektorat, BPKAD dan Bappeda. "Bahwa untuk Tahun 2023 tidak perlu lagi

leges di sini (Bappeda)," katanya.

Dulu, dijelaskan Yohana, leges dilakukan karena semua dokumen masih manual. Leges dilakukan sebagai verifikasi dan membuktikan bahwa kegiatan yang dikerjakan OPD bersama pihak ketiga benar adanya dan sesuai ketentuan. Leges menjadi syarat untuk pencairan anggaran di BPKAD.

"Sekarang tahun 2023 tidak perlu leges lagi karena dokumen semua ada di sistem. Semua sudah online dan saya berharap jadi informasi bagi masyarakat supaya tidak leges lagi. Ini juga membantu kami artinya kami juga butuh ruang untuk menyimpan dokumen," terang Yohana Paliling.

Yohana mengungkapkan, setahun setidaknya tidak kurang dari 1000 dokumen yang harus disimpan sementara ruangan sangat terbatas. Kemudian tanpa leges di Bappeda tentunya akan mempercepat proses pembayaran. OPD bisa langsung ke keuangan tanpa harus menunggu leges lagi. Sehingga ini akan membuat proses lebih efektif. "Karena kadang staf kami tidak ada di tempat, ya pasti ada hambatan jadi leges tidak perlu lagi," katanya.

Kebijakan ini akan diumumkan secara tertulis sebagai pemberitahuan ke OPD. Ia menyatakan, tanpa leges tidak akan menghilangkan keabsahan dokumen kontrak. Sebab tender sudah dilakukan melalui LPSE dan semua dokumen sudah masuk sebagai persyaratan. **(BAPPEDA)**



**Kepala Bappeda Mimika,
Ir Yohana Paliling, MSi,**

Foto: Bappeda



Bandar Udara Mozes Kilangin

Foto: Bappeda

Mozes Kilangin Ditarget Jadi Bandara Sehat

UPBU Mozes Kilangin berupaya mewujudkan Bandar Udara Mozes Kilangin menjadi bandara sehat. Untuk menuju target ini, UPBU Mozes Kilangin bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Biak mulai melakukan sosialisasi advokasi dan pembentukan Forum Bandar Udara Sehat, Kamis (9/3/2023) di Hotel Horison Ultima.

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas III Biak, Herman Nugraha mengatakan dengan melibatkan pihak terkait, upaya untuk mendorong Bandar Udara Mozes Kilangin mendapatkan predikat Bandar Udara Sehat mulai dilakukan.

Dengan predikat bandara sehat, berarti bandar udara dinilai bersih, nyaman dan aman bagi pengguna jasa layanan transportasi udara. Untuk penentuan predikat ini sendiri kata dia, koordinasi berada di bawah UPBU Mozes Kilangin.

Ke depannya, masih ada pertemuan lanjutan dan pembentukan forum yang di dalamnya akan ada bidang kesehatan, lingkungan, keamanan. "Masih berlanjut ya, jadi target kita tahun ini menyiapkan semuanya fasilitas sesuai indikator yang diperlukan,

akhir tahun kita usulkan untuk mendapat penilaian," ujarnya.

Herman berharap di tahun ini dengan tercapainya kelengkapan dokumen, pihaknya akan menyurat agar Bandar Udara Mozes Kilangin bisa masuk dalam salah satu peserta penilaian lomba bandara sehat.

Sementara itu Kepala UPBU Mozes Kilangin, Asep Soekarjo mengungkapkan pihaknya sudah menerapkan beberapa hal dalam pengelolaan bandara sesuai dengan kriteria badan internasional penerbangan tentang aironmental protection dan Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2017 terkait pengendalian limbah pesawat dan bandara.

Namun, untuk mewujudkan bandara sehat memang ia akui masih banyak hal yang harus dicapai dan dipenuhi. Untuk menuju ke program tersebut, pihaknya masih membutuhkan dukungan KKP kelas III Biak dan Dinas Kesehatan. Yang lebih penting juga tambahnya, dukungan dari masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi udara juga harus sehat. "Bandara sehat berawal dari pengguna jasa transportasi yang sehat dulu,"pungkas Asep. **(BAPPEDA)**

Bappeda Limpahkan Urusan Penataan Ruang ke Dinas PUPR

BADAN Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika secara resmi menyerahkan urusan penataan ruang kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pelimpahan itu ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi dan Kepala Dinas PUPR, Robert Mayaut, disaksikan Staf Ahli Pemkab Mimika, Ir Ignatius Eddy Santoso pada Kamis (9/3/2023).

Staf Ahli Pemkab Mimika, Eddy Santoso mengatakan pelimpahan ini meng-

acu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang secara eksplisit menyatakan bahwa urusan penataan ruang melekat pada Dinas PUPR.

Setelah penyerahan ini, Eddy Santoso menitikpkan beberapa hal untuk ditindaklanjuti terkait urusan penataan ruang diantaranya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mimika, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kuala Kencana, RDTR Kota Baru, RDTR

Perkotaan Timika dan pembentukan Forum Penataan Ruang serta pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung investasi dan salah satu syaratnya adalah perizinan di Kabupaten Mimika.

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling menjelaskan bahwa seharusnya urusan ini dilimpahkan mulai Tahun 2020 atau Tahun 2021, tapi Dinas PUPR baru bersedia di tahun ini. Sehingga urusan penataan ruang ditangani oleh Bappeda melalui BKPRD.

Dengan terbitnya Undang Undang



Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi menandatangani berita acara serah terima urusan penataan ruang.

Foto: Bappeda



Cipta Kerja Tahun 2020 berpengaruh dalam perubahan persyaratan dan proses perizinan salah satunya penataan ruang. Permen ATR/BPN Nomor 15 Tahun 2021 mengamanatkan Pemda membentuk Forum Penataan Ruang dimana Sekda menjadi ketua. Kemudian sesuai urusan maka Kepala Dinas PUPR menjadi sekretaris dan beranggotakan kepala OPD, instansi vertikal dan asosiasi profesi.

Yohana Paliling menjelaskan mengenai RTRW Kabupaten Mimika yang sudah ditetapkan lewat Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Mimika Tahun 2011-2031 yang saat ini dalam proses revisi. Revisi sudah dilakukan sejak Tahun 2017 hingga 2021. Prosesnya sudah hampir final dan menunggu antrian lintas sektor di Kementerian ATR/BPN.

Beberapa catatan dalam RTRW yaitu penyelesaian status kawasan hutan. Perencanaan pola ruang dan struktur tidak diperbolehkan berada di kawasan hutan. Sedangkan luas kawasan bukan hutan di Mimika hanya 9 persen. Sehingga Pemkab Mimika mengusulkan



Foto: Bappeda

perubahan fungsi dan peruntukan ke Pemprov Papua dalam rangka revisi RTRW Provinsi. Total kawasan yang diajukan seluas 145.437,66 hektar.

Kemudian penyelesaian batas administrasi perbatasan antar kabupaten. Selama ini dikatakan Yohana, batas administrasi masih bersifat indikatif dan masih berproses di Kemendagri. Dari delapan batas administrasi, tiga masih indikatif yaitu perbatasan dengan Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai dan batas laut.

Adanya pemekaran provinsi lanjut Yohana juga menjadi catatan. Pasalnya revisi RTRW kabupaten

mengikuti RTRW provinsi. Dengan adanya pemekaran dimana Mimika masuk dalam Provinsi Papua Tengah tentunya akan menunggu lama. Sehingga ia berharap ada regulasi atau kebijakan yang bisa memudahkan karena revisi RTRW Mimika sangat mendesak untuk kepentingan pembangunan.

Bappeda Mimika kata Yohana telah menyelesaikan penyusunan RDTR Kota Baru, RDTR Perkotaan Timika dan RDTR Kuala Kencana. Ia berharap setelah pelimpahan urusan ini bisa ditindaklanjuti salah satunya untuk mendukung perizinan berusaha berbasis risiko.





Tahun 2023, Kementerian ATR/BPN menetapkan Mimika sebagai salah satu lokasi percepatan penyelesaian RDTR karena masuk dalam 500 lokasi investasi terbanyak. “Jadi sangat dibutuhkan percepatan proses ini agar kita lebih memudahkan dan terbuka bagi investor di Mimika,” terangnya.

Adanya urusan penataan ruang, menjadikan Bappeda sebagai OPD yang mengeluarkan rekomendasi izin pemanfaatan ruang melalui BKPRD. Sejak Tahun 2016-2022, Bappeda menerbitkan sebanyak 1.596 rekoemdnasi dengan tahun penerbitan paling banyak Tahun 2021 sebanyak 775 rekomendasi. Ini

dikarenakan proses perizinan sudah dilakukan secara online dan manual.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Mimika, Robert Mayaut menyatakan pihaknya siap untuk menindaklanjuti apa yang menjadi tugas dan urusan penataan ruang. Tentunya, Dinas PUPR akan terus berkoordinasi dengan Bappeda dan instansi terkait dalam pelaksanaan. Salah satu tindaklanjut yang akan dilakukan adalah pembentukan Forum Penataan Ruang untuk menggantikan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) yang ada di Bappeda selama ini.(BAPPEDA)



Foto: Bappeda

Kemitraan Pemkab Mimika

PTFI dan Sandvik Wujudkan SDGs Penyediaan Air Bersih

UNTUK mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), Pemerintah Kabupaten Mimika bersama PT Freeport Indonesia telah membentuk Forum Kemitraan Multi Stakeholder yang melibatkan lintas sektor.

Melalui forum ini, sesuai dengan peran yang dilakukan berupaya untuk mewujudkan tujuan SDGs salah satunya adalah mewujudkan akses air minum dan sanitasi aman yang berkelanjutan

bagi semua. Isu ini menjadi pembahasan dalam dialog bertajuk “Para-para SDGs Timika (PaSTi) No-Komen (No-Ken)” pada Rabu (8/3/2023).

Kegiatan yang digagas oleh Bappeda Mimika didukung oleh PT Freeport Indonesia dan PT Sandvik, serta melibatkan sektor pemerintahan, sektor swasta khususnya perusahaan yang beroperasi di Mimika, para pemangku kepentingan lainnya dari filantropi, lembaga adat agama, akademisi, dan ber-

bagai komunitas.

Dialog kemitraan pertama di Timika ini mengambil slogan PaSTi NoKen, singkatan dari Para-para SDGs Timika No Komen. Slogan ini memiliki makna filosofis yaitu “Para-Para” diambil dari kearifan lokal Papua, yaitu membicarakan hal yang menjadi tujuan bersama, memberikan manfaat bersama, serta menjadi komitmen bersama.

Sedangkan “NoKen” mengambil konteks budaya setempat yaitu noken yang



Suasana penyelenggaraan forum kemitraan multi-stakeholder Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2023.

Foto: Bappeda



Suasana penyelenggaraan forum kemitraan multi-stakeholder Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2023.

Foto: Bappeda

berfungsi sebagai wadah untuk mengisi apa yang dibawa, dan memiliki arti apa pun yang sudah diisi di dalam noken tidak akan dikomentari (No-Komen) kembali, agar dapat segera diolah dan ditindaklanjuti bersama dalam semangat kemitraan dan kolaborasi.

Dialog yang mengusung tema air bersih ini juga berkontribusi pada SDGs tujuan 3, yaitu “Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia”. Selain itu, program-program yang disampaikan dinaungi semangat SDGs tujuan 17, yaitu “Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan”.

Staf Ahli Bidang kemasayarakatan dan Sumber Daya Manusia Pemkab Mimika, Ignatius Eddy Santoso, menyampaikan pentingnya sinergi program dan kegiatan multipihak. “Saya sangat bersyukur, dan memberikan apresiasi tinggi terhadap upaya berbagi mengenai apa yang telah dilakukan. Hal seperti ini dapat meningkatkan komitmen ber-

sama. Koordinasi kemitraan yang inklusif, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pihak-pihak lain, serta partisipasi aktif multipihak dalam pembangunan, diharapkan benar-benar dapat menjadi solusi dan memberikan akselerasi dalam menjawab tantangan dan memecahkan masalah-masalah yang ada,” jelasnya.

Sekretaris Bappeda Mimika, Joseph Mangasa terus mengajak semua pihak untuk melakukan akselerasi dalam realisasi pencapaian SDGs. “Caranya adalah dengan menggabungkan dan sinkronisasi seluruh potensi yang ada. Kolaborasi baik dari sektor pemerintah kabupaten dan desa, pelaku usaha, berbagai lembaga serta komunitas masyarakat lainnya, perlu diupayakan sinergi sehingga dapat didokumentasi ke dalam dokumen Rencana Aksi Daerah, khususnya siapa berbuat apa dan di mana. Hal ini penting agar sasaran program dan kegiatan dampaknya dapat langsung dirasakan masyarakat,” kata Joseph Mangasa.

Selain tujuan pembangunan dapat

tercapai, kegiatan seperti ini menurut Joseph juga dapat meningkatkan sumber daya daerah, peningkatan dokumentasi daerah terkait kontribusi terhadap TPB/SDGs, serta peningkatan koordinasi karena berbagi pembelajaran dapat menginspirasi upaya pencapaian pembangunan lainnya.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Suyani memaparkan realisasi pembangunan Sistem Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi hingga 2023 di Mimika serta perencanaan pembangunan selanjutnya. “Perencanaan pembangunan ini diharapkan menjadi referensi dalam kemungkinan kolaborasi dan kemitraan pembangunan,” katanya.

Tantangan tersebut dijawab oleh Irwan Marabessy, Manager CSR PT Sandvik Indonesia. Irwan menjelaskan kemitraan yang telah dilakukan PT Sandvik dengan Pemkab Mimika dalam mengupayakan penyediaan air bersih yang berkelanjutan dilakukan dalam bentuk bantuan hibah infrastruktur dan sarana air bersih untuk pelayanan masyarakat



di Kampung Muare, Distrik Mimika Timur.

Prasarana yang sudah dibangun adalah menara berkapasitas tampung 4,8 ribu liter air bersih yang menggunakan sistem pompa sumur bor untuk kemudian dialirkan ke 15 rumah warga sekitar. Pendistribusian ini masih terus dilanjutkan untuk memberi akses ke lebih banyak rumah, semakin meningkatkan kesejahteraan, dan memberi lebih banyak manfaat bagi masyarakat.

“Kolaborasi multipihak yang sudah berjalan harus terus berlanjut agar program-program TPB/SDGs yang dilakukan oleh semua pihak aktor pembangunan non-pemerintah (non-state actor) tidak tumpang tindih. Kami juga ingin

mengajak perusahaan lain untuk ikut bersinergi, melakukan kontribusi, dan berkomitmen bagi masyarakat sekitar,” jelas Irwan.

Kolaborasi lain juga dipaparkan Daniel Perwira, Manager Community Health Departemen PT Freeport Indonesia (PTFI), yang menekankan hubungan antara penyediaan air bersih dan kesehatan masyarakat. Air bersih dan layak konsumsi untuk mendapatkan untuk memenuhi kebutuhannya adalah hak dasar masyarakat. Ketersediaan atau akses atas air bersih dan sanitasi juga menentukan standar kesehatan masyarakat.

Untuk itu, promosi membangun kesadaran masyarakat





mengenai perilaku hidup bersih dan sehat sangatlah penting. "Air bersih sangat berkorelasi dengan kesehatan, dengan tubuh yang sehat maka efek gandanya pada produktivitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan. Pelibatan dan dukungan masyarakat kampung serta semua pihak juga perlu diupayakan agar masyarakat juga dapat memelihara aset tersebut. Pemahaman mengenai korelasi tersebut akan menumbuhkan rasa kepemilikan bersama, sehingga keberlanjutannya dapat terus dirasakan."

Untuk meningkatkan kesadaran adanya hubungan antara air bersih dan kesehatan tersebut, PTFI juga melakukan penyuluhan di Puskesmas, Posyandu, seko-

lah, tempat ibadah, lapangan dan tempat berkumpulnya masyarakat di beberapa lokasi seperti Utikini Baru, Wangirja, Pomako, beberapa desa Kamoro, Manasari, Otakwa dan Pigapu. Selain itu, PTFI bermaksud merealisasikan revitalisasi fasilitas air bersih di desa-desa terdampak di sekitar PTFI sehingga semua masyarakat dapat mengakses air bersih.

Forum Kemitraan yang mengambil format dialog santai, hangat, namun tetap serius ini merangkum koordinasi, sinergi, kolaborasi, dan pelibatan masyarakat adalah kunci keberhasilan semua pembangunan yang ada di Kabupaten Mimika. Acara Forum Kemitraan ini diharapkan menjadi kegiatan reguler dan bisa melibatkan semua aktor pembangunan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Mimika. (BAPPEDA)



Suasana penyelenggaraan forum kemitraan multi-stakeholder Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2023.

Foto: Bappeda



Jembatan Selamat Datang Rampung Dikerjakan



Foto: Bappeda

Pemkab Mimika Bayar Gaji Honorer

KABAR gembira bagi ribuan honorer di Kabupaten Mimika. Setelah menunggu selama tiga bulan, akhirnya gaji yang dinantikan mulai proses untuk pembayaran. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, Marten Mallisa ketika ditemui Selasa (14/3/2023) di Kantor Pusat Pemerintahan.

Marten Mallisa menyebut keterlambatan pembayaran gaji honorer disebabkan SK perpanjangan kontrak honorer untuk Tahun 2023 yang baru dikelurakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). "Karena baru keluar jadi kita baru proses," katanya.

Proses pembayaran dikatakan Marten tidaklah lama. Sekitar dua hari ini, honorer dipastikan sudah menerima pembayaran gaji langsung ke rekening masing-masing. Pembayaran dilakukan secara kolektif dari BPKAD berdasarkan daftar dari BKPSDM.

Soal nilai gaji honorer dipastikan tidak ada perubahan atau kenaikan. Masih seperti tahun sebelumnya. Besaran gaji disesuaikan dengan tingkat pendidikan. Lulusan SMA, S1 dan S2 tentunya berbeda. Namun semuanya sesuai standar UMK yang tidak kurang dari Rp 4 juta.

Struktur gaji itu meliputi gaji pokok, uang makan dan tunjangan perbaikan penghasilan. "Inikan disatukan semua, TPP, gaji pokok dan yang makan jadi sekitar Rp 4 juta lebih," ujar Marten Mallisa.

Adapun jumlah honorer di lingkup Pemkab Mimika yang mendapat SK Bupati sekitar 2.650 orang. Ini belum



Honorer di lingkup Pemkab Kabupaten Mimika



Foto: Bappeda

termasu guru kontrak yang digaji melalui Dinas Pendidikan menggunakan dana Otonomi Khusus (Otsus).

Juga guru honorer yang di SMA maupun SMK belum masuk dalam data base Pemkab Mimika meskipun kewenangan pendidikan menengah sudah dilimpahkan kembali ke kabupaten. "Honore SMA belum ada data.

PNS saja belum tuntas, jadi belum digaji dari kabupaten," tandasnya.

Marten Mallisa menambahkan, data sekitar 2.650 ini masuk termasuk honorer yang sudah diusulkan menjadi CPNS. Meski sudah menjalani tes tapi karena belum mendapat SK, maka masih masuk dalam daftar dan digaji sebagai honorer. **(BAPPEDA)**

Gerakan Pangan Murah Tekan Inflasi

GUNA menekan inflasi, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah di Tahun 2023. Gerakan pangan murah dengan pasar murah diselenggarakan selama 22 kali dalam setahun atau dua kali sebulan. Khusus memenuhi kebutuhan hari raya keagamaan, pasar murah akan digelar

selama empat kali sebulan.

Saat membuka kegiatan pasar murah di pelataran Gedung Eme Neme Yauwारे, Senin (19/3/2023), Plt Bupati Johannes Rettob menyebut ini merupakan kebijakan pemerintah pusat sampai di daerah. Pemerintah daerah kata dia, setiap saat diharapkan dapat mempertahankan harga-harga komoditi di Mi-

mika.

Rettob berharap seluruh instansi rum-pun ekonomi bersama Pj Sekda dan Asisten II yang menghimpun hal ini agar terus melakukan koordinasi dan mempetakan anggaran khusus dan prioritaskan dalam pembangunan ke depan agar masyarakat dapat menikmati harga yang terjangkau, semua



Foto: Bappeda



Foto: Bappeda

masyarakat bisa menikmati pelayanan ini.

Tahun 2023 di Februari sebutnya, Mimika adalah salah satu daerah yang infasinya terendah di Indonesia. Inflasi 5,3, pemerintah akan berusaha terus. Inflasi ini rendah dari pada angka nasional. "Kita akan terus berusaha untuk menekan ini, agar di bawah 5, 4 bisa dibawah itu, bisa berkolaborasi,"ujarnya.

Lanjutnya ini adalah tugas pemerintah agar masyarakat bisa terus menikmati harga barang yang terjangkau dan tidak mengalami kenaikan. Ia juga berharap para pedagang untuk tetap pertahankan harga. Jika ada harga barang yang naik, pemerintah akan mencatat dan mencoba menjualnya di pasar murah dengan harga yang terjangkau. "Pemerintah akan mengontrol setiap usaha untuk hal ini,"ujarnya.

Pasar murah selain sudah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, ke depan ia harapkan seluruh instansi bisa berkolaborasi untuk melakukan agenda yang sama baik instansi rumpun ekonomi guna menekan inflasi di Mimika. "Kita harus berjuang suatu saat kita inflasi terendah di seluruh Indonesia,"ujarnya.

Para distributor, pedagang di bulan Ramadhan agar harga barang tidak dinaikkan. Kepada tim inflasi daerah ia harapkan selalu dipantau. Jika ada harga barang yang naik, maka pemerintah akan mensubsidikanya agar bisa dijangkau oleh masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Yulius Koga mengatakan kegiatan pasar murah ini dilaksanakan dalam rangka mengimbangi inflasi daerah dan menyambut bulan Ramadhan. Nantinya untuk hari raya, kegiatan pasar murah juga masih akan dilakukan. Gerakan pangan murah adalah program rutin tahun ini yang rencananya digelar selama 22 kali. Dalam sebulan, pelaksanaanya dua kali. Dan, akan ditambah pelaksanaanya apabila menjelang hari raya. "Ini memang sudah dianggarkan untuk hari raya keagamaan,"ungkapnya.

Khusus untuk hari raya Idul Fitri, pasar murah akan dilaksanakan 4 kali. Pasar murah dilaksanakan selama bulan puasa dengan dukungan Bulog, Dinas Peternakan dan Keswan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.(BAPPEDA)

Pemkab Mimika Jalin MoU dengan PT Pangansari Utama

PT PANGANSARI Utama (PSU) menjadi pelopor pemberdayaan ekonomi peternak di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, menyusul ditandatanganinya nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) penyerapan daging ayam potong lokal antara Pemkab Mimika dan PT Pangansari Utama di Jakarta, Jumat sore (03/03).

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Presiden Direktur PT Pan-

gansari Utama, Maghfur Lasah, yang disaksikan langsung sejumlah jajaran dari Pemkab Mimika dan jajaran Direksi PT Pangansari Utama.

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob mengapresiasi MoU, yang diharapkan bisa segera diwujudkan di lapangan. Menurut Plt Bupati, pihaknya bersama PT Pangansari Utama akan berkolaborasi memberdayakan dan meningkatkan ekonomi peternak di Kabupaten Mimika. "Menjadi tugas bersama mensejahterakan peternak. Kami berterima kasih

kepada Pangansari atas ditandatanganinya MoU ini dan diharapkan nantinya Pangansari bisa menyerap daging ayam dari para peternak." kata Plt Bupati.

Presiden Direktur PT Pangansari Utama, Maghfur Lasah mengatakan, MoU ini adalah komitmen dari Pangansari, yang tidak hanya mementingkan bisnis semata, tetapi ingin turut serta membangun Mimika melalui pemberdayaan peternak lokal. Bagi Pangansari, pemberdayaan peternak lokal, tidak saja dilakukan hanya untuk mementingkan



Foto: Bappeda



Foto: Bappeda

kuantitas, tetapi daging ayam lokal dari Mimika diarahkan memiliki standar kualitas sesuai kebutuhan Pangansari. "Pangansari ingin berkontribusi nyata

mendukung peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Kami sangat berharap kerja sama ini juga bermanfaat bagi masyarakat lokal," jelas Lasah.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Mimika, Sabelina Fitriani menjelaskan, pihaknya secepatnya menindaklanjuti kerja sama ini



Foto: Bappeda

dengan mengurus berbagai persiapan guna memenuhi kebutuhan penyerapan daging ayam lokal oleh Pangansari. Penyiapan rumah potong dengan kapasitas dua ton per hari merupakan satu upaya untuk memenuhi kebutuhan Pangansari sebanyak 50 ton per bulan.

Sabelina mengaku, selama ini usaha peternak lokal sulit berkembang karena kalah bersaing dengan daging ayam dari luar Mimika. Peternak lokal memasarkan daging ayam pada hari-hari besar, seperti lebaran, natal pada saat kebutuhan daging ayam meningkat. Karena itu dengan dilakukannya MoU antara Pemkab Mimika dan PT Pangansari Utama, akan mampu mendorong petani untuk beternak secara kontinyu.

“Dengan adanya MoU ini, kita berharap petani bisa menangkap peluang, tidak saja beternak saat kebutuhan daging ayam meningkat seperti hari-hari besar agama, tetapi dilakukan terus-menerus karena pasarnya sudah jelas dan diserap oleh Pangansari,” kata Sabelina.

Sementara itu Wawan Sasongko, senior management PT Pangansari menyatakan bahwa pihaknya

telah mengatur persiapan-persiapan teknis dengan Sabelina secara matang untuk mengimplementasikan kerjasama ini agar berjalan sesuai yang ditargetkan. “Melalui salah satu anak perusahaan Pangansari group, kami sudah merancang kerjasama ini dengan matang terkait penyerapan, pendampingan dan edukasi proses bagi peternak nantinya. Penyerapan ini akan digunakan sebagai material bahan baku bagi pelayanan PT Pangansari Utama sebagai catering & services yang melayani 22.000 karyawan Freeport di Tembagapura & Timika. Di Timika kami telah menunjuk salah satu pimpinan Pangansari disana yaitu Ponchiano Casili sebagai pelaksana teknis dilapangan”. pungkas Wawan.

Seperti diketahui bahwa PT Pangansari Utama memiliki 10 perusahaan yang bergerak dibidang industri makanan termasuk PSU yang melayani berbagai pertambangan di Kalimantan, Sulawesi, NTT, Jababeka dan Papua. Di Papua sendiri PSU melayani catering & services untuk PT Freeport Indonesia, PT CSTS di kawasan LNG Bintuni dan PT Petrosea di Sorong. **(BAPPEDA)**



Foto: Bappeda

Komisi B DPRD Sidak ke Distributor Sembako

UNTUK memastikan stok sembako selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah dan menjelang Paskah, Komisi B DPRD Mimika melakukan sidak di beberapa pusat perbelanjaan dan gudang beras Bulog Timika, Selasa (28/3/2023).

Ketua Komisi B, M Nurman S Karupkaro mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir akan kosongnya pasokan sembako di momen Ramadhan dan jelang Paskah sampai Idul Fitri nanti, karena dapat dipastikan stok sembako aman. "Masyarakat kami harap tidak panik karena stok sembako aman sam-

pai tiga bulan ke depan," ujarnya.

Selain memastikan stok sembako aman, Komisi B juga menekankan kepada para pengusaha agar tidak ada kenaikan harga barang yang membuat masyarakat tidak berdaya.

Komisi B lanjut Nurman juga sudah mengunjungi Supermarket Diana, Gelael dan Ramayana. Di sana ditemukan ada barang-barang yang menjelang kadaluarsa yakni makanan ringan seperti biskuit.

"Bukan saja di situ tapi di kios dan toko-toko lain kami himbau barang yang sudah mau kadaluarsa ini harus ditarik

dan tidak diperjualbelikan," ungkap Nurman.

Pada saat sidak kata Nurman, Komisi B juga memunculkan masalah timbangan beras di gudang Bulog yang belum ditera ulang. Pihak Bulog kata dia harus memperhatikan masalah timbangan tera. Juga temuan soal beras 5 kg yang dikemaa di dalam satu karung namun setelah ditimbang ternyata beratnya tidak sampai 5 kg. "Harus diperhatikan agar timbangan yang ada bisa ditera ulang. Diperbaiki, jangan sampai konsumen dirugikan," jelasnya.

(BAPPEDA)



Foto: Bappeda

Baru Dua Bulan Mimika Sudah Sumbang Rp 754,6 Miliar Untuk Negara

SAMPAI dengan 28 Februari 2023, penerimaan negara di Kabupaten Mimika dan sekitarnya terealisasi sebesar Rp 754,6 miliar atau mencapai 16,6 persen dari target sebesar Rp 4,5 triliun.

Penerimaan Negara tersebut terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp486,56 miliar, Penerimaan Pajak Perdagangan internasional dan Penerimaan Negara Bukan Pajak se-

besar Rp10,1 miliar atau 27,6 persen.

Kepala KPPN Mimika, Iwan Megawan dalam konferensi pers yang digelar Rabu (29/3/2023) menyebut berdasarkan data kinerja penerimaan pajak dalam negeri yang terdiri dari PPh, PPN dan PPnBM, PBB (P3L) dan pajak Lainnya pada bulan Februari 2023 berhasil mencapai realisasi sebesar Rp 486.560.893.725 atau sekitar 12,23 persen dari target penerimaan tahun

2023.

Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2022 pada periode yang sama yaitu sebesar Rp 337.259.778.064 maka penerimaan pajak di awal Tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar 44,27 persen.

Kontribusi pajak terbesar adalah PPh Non Migas dengan realisasi sebesar Rp414.861.961.050 atau 85,26 persen





dari total penerimaan pajak. Pada urutan kedua adalah PPN dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 70.671.883.675 atau 14,52 persen dari total penerimaan pajak. Kemudian diikuti dengan Pajak Lainnya dengan realisasi penerimaan sebesar Rp 1.027.049.000, atau 0,21 persen dari total penerimaan pajak.

Sementara itu, Kepala KPP Pratama Timika, Ambar Arum Ari Mulyo mengatakan jika dilihat dari sektor usaha, capaian kinerja penerimaan KPP Pratama Timika ditunjang oleh sektor pertambangan dan penggalian dengan kontribusi sebesar 45,48 persen. Selanjutnya diikuti oleh sektor konstruksi dengan kontribusi sebesar 18,87 per-

sen dan disusul sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib dengan kontribusi sebesar 7,74 persen.

Untuk penerimaan Bea Masuk terealisasi sebesar Rp 42.527.614.000 atau mencapai 20,4 persen dari target yang ditetapkan. Penerimaan Bea Keluar terealisasi sebesar Rp 215.419.651.000 atau mencapai 68,1 persen dari target yang ditetapkan.

Dalam kesempatan ini, Ambar juga mengatakan jika kinerja kepatuhan wajib pajak sampai 27 Maret 2023 masih terdapat 32.285 wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan tahun pajak 2022. Kata Ambar,

masih ada tiga hari waktu penyelesaian SPT tahunan tahun 2022. Ia harapkan para wajib pajak bisa melaporkan SPT mereka agar terhindar dari denda pajak.

Khusus untuk penerimaan dari sektor bea masuk dan bea keluar, R L Candra mewakili Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Timika menyebut 90 persen penerimaan negara berasal dari bea masuk dan 10 persen saja dari bea keluar.

Untuk pajak perdagangan internasional sendiri sudah terealisasi Rp 257,9 miliar dari target Rp 500 miliar lebih. (BAPPEDA)



18 Distrik Gelar Musrenbang

PEMERINTAH Distrik se-Kabupaten Mimika yang jumlahnya 18 melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Agenda ini merupakan forum dimana pemerintah kampung dan pemerintah distrik membahas program yang diusulkan ke Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika, Paulus Dumais yang hadir membuka beberapa kegiatan Musrenbang distrik menekankan agar setiap program yang diusulkan harus benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat. "Saya harapkan para peserta musrenbang, untuk melihat program yang betul menyentuh masyarakat," tegas Dumais.

Sebab kata dia bahwa program yang diusulkan dalam forum musrenbang Distrik, harus sesuai dengan kondisi daerah dan potensi yang ada di distrik. "Kami dari pemerintah berharap setelah

musrenbang ini selesai, akan mendapatkan satu hasil yang memberikan gambaran tentang kebutuhan masyarakat di distrik," ucapnya.

Kepala Distrik Kwamki Narama, Naf-tali Edwin Hanuebu salah satu distrik yang menggelar Musrenbang mengatakan semua program yang dibawa dalam musrenbang berdasarkan kebutuhan masyarakat yang telah dibahas sebelumnya di musrenbang tingkat kampung. "Hasil musrenbang kampung

yang menjadi prioritas yang akan dorong. Karena itu merupakan kebutuhan dari masyarakat," ungkap Kadistrik.

Bahkan ia menguraikan bahwa ada 5 program prioritas yang telah diusulkan yakni penerangan jalan, pendidikan, pembangunan jalan, kesehatan dan air bersih. "Harapan saya, apa yang sudah kita bahas di musrenbang kampung dan kelurahan itu bisa kami usulkan untuk ditindak lanjuti oleh tim dari Bappeda," ujar Kadistrik. **(BAPPEDA)**



Foto: Bappeda

vivo Y21s
17 Mar 2023 10:10

Kampung Unimogum Usul 7 Program di Musrenbang

DALAM Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kampung Unimogum Distrik Alama, aparaturnya pemerintah kampung mengusulkan 7 program.

Melalui Musrenbang Kampung Unimogum yang dilaksanakan di Hotel Serayu, Selasa (7/3/2023), setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, seluruh peserta musyawarah menyepakati kesepakatan akhir untuk kampung.

Tujuh usulan tersebut yakni pembangunan gedung gereja, pembersihan lahan, jalan padat karya, kegiatan ibu-ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk pelatihan tata boga, penanganan stunting, Sustainable Development Programs (SDGs) kampung dan kebutuhan fasilitas air bersih

Kepala Distrik Alama, Hasan Kemong mengatakan pengusulan dari kampung ini selanjutnya akan diteruskan ke Mus-

renbang tingkat distrik lalu Musrenbang tingkat kabupaten. Yang menjadi perhatian distrik kata dia adalah usulan pembangunan sarana fisik. "Jika ada usulan fisik, ini yang akan kita kasi naik ke kabupaten," ujarnya.

Sementara untuk usulan program lain seperti pengadaan fasilitas air bersih bisa dilaksanakan sendiri dengan dana kampung.

Distrik Alama sendiri kata dia, terdiri dari 13 kampung dan masih ada 6 kampung yang belum melakukan Musrenbang karena kondisi keamanan yang belum mendukung. Ia berharap kondisi keamanan di Distrik Alama bisa segera pulih sehingga semua aktivitas bisa dilaksanakan dengan normal kembali. "Saya harap semua kembali membaik saja," pungkasnya. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda

Musrenbang Distrik Mimika Tengah Hasilkan 88 Usulan Program

MUSYAWARAH Rencana Pembangunan (Musrenbang) Distrik Mimika Tengah menghasilkan 88 usulan program dan kegiatan. Musrenbang digelar Jumat (17/03/2023) di Kantor Distrik Mimika Tengah.

Kepala Distrik Mimika Tengah, Thobias Baka, SSTP, Selasa (21/3/2023) mengatakan hasil dari Musrenbang ini nantinya akan menjadi masukan dan usulan program kegiatan dari tingkat distrik kepada pemerintah. Usulan ini diharapkan masuk dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Tahun Anggaran 2024.

"Ada 88 usulan program kegiatan yang nanti diharapkan menjadi masukan dan usulan kegiatan dari distrik kepada pemerintah," jelas Thobias.

Thobias menyebut beberapa program kegiatan prioritas di Distrik Mimika Tengah yaitu peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat, ini merupakan target yang paling utama yang harus diperhatikan dan ditangani secara serius.

Selanjutnya, peningkatan mutu pendidikan dan peningkatan kesehatan bagi masyarakat, peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup, pengadaan listrik dan air bersih untuk masyarakat, peningkatan layanan telekomunikasi dan internet, pengadaan rumah layak huni untuk masyarakat 5 kampung.

Ada juga penanganan dampak banjir rob dan pendangkalan sungai, peningkatan pengelolaan hasil perikanan, pengadaan alat tangkap ikan dan fasilitasi penjualan hasil laut.

Yang tidak kalah penting kata Thobias, ketahanan dan pemanfaatan pangan lokal terutama pengelolaan ikan, kepiting, sagu dan kelapa, peningkatan akses transportasi laut dan sungai dengan



Foto: Bappeda



melakukan pembersihan dan pengerukan sungai, pembangunan pelabuhan rakyat dan jembatan penghubung dalam di 5 kampung.

Pengadaan alat transportasi berupa perahu dan mesin jhonson bagi masyarakat 5 kampung. Pembangunan jembatan penghubung ke Kampung Kamora juga menjadi perhatian.

Selain itu, pengadaan polsek atau pos polisi di Distrik Mimika Tengah serta pemetaan digital batas administrasi distrik dan kampung diharapkan menjadi perhatian untuk dapat diakomodir. Terakhir, pembangunan rumah pegawai dan guest house Distrik Mimika Tengah.

Thobias berharap para Anggota Dapil 6, tim dari Bappeda mimika, perwakilan OPD dan semua pemangku kepentingan untuk dapat bersama-sama memperjuangkan, memfasilitasi, dan menjembatani sehingga usulan program kegiatan yang dimasukan atau diusulkan nantinya, dapat dianggarkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 mendatang.

"Saya harap mari kita sama-sama memperjuangkan yang menjadi usulan dan prioritas masyarakat, demi terwujudnya pembangunan yang maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di wilayah Distrik Mimika Tengah," pungkasnya. (BAPPEDA)

Musrenbang Distrik Wania Usulkan 153 Program

PEMERINTAH Distrik Wania Kabupaten Mimika, menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan di kantor Distrik Wania pada Selasa (21/3/2023).

Hadir dalam kegiatan musrenbang tersebut yakni Pemerintah Distrik Wania dan Tim Asistensi dari Bappeda Kabupaten Mimika. Kemudian Pemerintah kampung, Kelurahan, tokoh agama, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, serta tiga anggota DPRD Kabupaten Mimika dari Dapil Wania yakni Mery Pongutan, Daud Bunga, dan Leonardus Kocu.

Kepala Distrik Wania, Richard Wakum yang ditemui wartawan usai pelaksanaan musrenbang, mengatakan program yang diusulkan tersebut merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat yang ada di Distrik Wania.

Lebih lanjut Kadistrik menguraikan bahwa 153 program yang diusulkan itu, terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang ada di 3 kelura-



Foto: Bappeda

han dan 4 kampung di Wilayah Distrik Wania.

Sehingga ia berharap agar dari total 153 program yang diusulkan itu, kiranya bisa terakomodir dan di realisasikan nantinya di Tahun 2024 mendatang. "Usulan ini dari masyarakat, dan memang

ini kebutuhan dari kami yang ada di Wania. Jadi harapan kami, bisa di akomodir. Kalau tidak semua, ya mungkin 90 persen. Karena kan di Distrik lain juga pastinya ada punya usulan program yang prioritas," jelas Wakum. (BAPPEDA)



Foto: Bappeda



Musrenbang Agimuga



Musrenbang Amar



Musrenbang Hoeya



Musrenbang Iwaka





Musrenbang Tembagapura



Musrenbang Jita



Musrenbang Kuala Kencana





Musrenbang Mimika Barat



Musrenbang Mimika Barat Jauh



Musrenbang Mimika Barat Tengah





Musrenbang Mimika Baru



Musrenbang Mimika Timur Jauh



Musrenbang Mimika Timur Jauh





Mimika Membangun